

**PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA LOKAL MENUJU
OTONOMI DAERAH YANG UNGGUL DAN
KOMPETITIF**

**Momon Sudarma
Pengajar Mata Pelajaran Geografi**

**MAN 2 Kota Bandung
2004**

PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA LOKAL MENUJU OTONOMI DAERAH YANG UNGGUL DAN KOMPETITIF

I. PENDAHULUAN

Paradigma pembangunan pertanian, menurut Wiratanakusumah (2001) harus digeser dari posisinya sebagai sektor menjadi sebuah bidang, agar bisa didukung oleh seluruh sektor ekonomi dan institusi. Pendekatan bidang ini menjadi krusial sebab kenyataannya dalam masa krisis sekarang hanya pertanianlah yang tumbuh positif dan mampu menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi¹.

Kesadaran untuk melakukan proses perubahan paradigma pembangunan pertanian ini, pun dikemukakan oleh Bungaran Saragih (2003)². Dalam konteks kepentingan ini, saragih mengatakan bahwa kebijakan pembangunan sektor pertanian yang digalakkan pemerintah sekarang ini lebih diarahkan ke usaha agrobisnis. Artinya yang akan dibangun bukan hanya pertaniannya saja, tapi juga industri hulu, hilir dan jasa pendukungnya.

Menurut Saragih, kebijakan pembangunan sektor pertanian di Indonesia saat ini, lebih memfokuskan pada strategi pembangunan sektor pertanian dengan titik berat pembangunan pada peningkatan produksi bukan pada proses

¹ M. Aman Wiranatakusmuh. *Saatnya Merombak Paradigma Pembangunan Pertanian*. Kompas, 13 Juli 2001.

² Bungaran Saragih. Kompas, 23 Maret 2003.

industrialisasi atau *market oriented*, sehingga proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di kalangan petani menjadi sangat lemah dan kurang.

Mulai sekarang, katanya, kebijakan itu akan diubah dengan cara selalu mengkaitkan pembangunan sektor pertanian dengan pengembangan usaha yang terkait dengan pertanian, baik di hulu, hilir maupun di bidang jasa pendukungnya. Ia mengatakan, di Thailand pengembangan sektor pertaniannya jauh lebih maju karena di sana banyak pengusaha yang terlibat di bidang pertanian, baik dalam kegiatan produksi, pengolahan maupun pemasarannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa problema pembangunan pertanian di Indonesia ini, sangat kompleks.

Pertama, Generasi muda di Indonesia, dari tahun ke tahun, menurun minatnya menjadi petani. Bahkan, kaum intelektual (*educated*) tampaknya kurang berminat mengembangkan kariernya dalam bidang pertanian.³ Kondisi ini, sudah pasti memiliki dampak yang sangat luas dan signifikan bagi proses keberlanjutan pembangunan pertanian di Indonesia.

Kedua, seperti yang diungkapkan Saragih, di Indonesia kurang sekali pengusaha yang terlibat di sektor pertanian. Pengusaha kita di sini takut berbisnis di sektor pertanian, makanya kita selama ini tertinggal dalam soal padi ini dibanding Thailand⁴.

³ Yudohusodo. 22 maret 1999.

⁴ Op.cit Saragih.....Tahun 2003.

Ketiga, lemahnya daya saing pertanian Indonesia dalam konteks perdagangan internasional. Saragih, dalam konteks ini menegaskan bahwa proses pembangunan pertanian kali ini akan selain diarahkan ke agribisnis, kebijakan pembangunan sektor pertanian sekarang juga ditekankan untuk memiliki daya saing karena dalam perdagangan bebas nanti. Daya saing itu sangat menentukan. Produk pertanian Indonesia, katanya, kalau tidak memiliki daya saing akan sulit menembus pasaran internasional. Efek negatifnya, jika pertanian Indonesia tidak memiliki daya saing di pasaran internasional, maka pasaran internasional yang akan menjadi factor yang meramaikan pertanian dalam negeri. Kondisi ini akan sangat merugikan bagi masa depan petani Indonesia itu sendiri.

Keempat, pada sisi lainnya, sektor pertanian ini, merupakan sector ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak. Dorodjatun Koentjarajakti, (Kompas, 19/8/2002) mengatakan bahwa sector pertanian dapat mengurangi tingkat pengangguran, karena menyerap tenaga kerja sangat besare. Pada tahun 2001, sektor pertanian menyerap tenaga kerja hingga 48,89 juta orang. Jumlah itu merupakan kenaikan dari tahun 2000, yang hanya 44 juta orang⁵.

Hal-hal tersebut di atas, merupakan kritik sekaligus fakta pembangunan yang sangat ironik bagi bangsa Indonesia. Sebab, bangsa Indonesia selama ini dan sampai saat ini, masih merupakan sebuah negara agraris, dan negara besar dan luas lahan pertaniannya. Namun, ternyata belum mampu mengoptimalkan potensi pertanian bagi proses kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil dan merata.

⁵ Dorodjatun Koentjarajakti. Kompas. 19 Agustus 2002.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut di atas, maka dapat dirumuskan sejumlah hipotesis pemikiran sebagai berikut ini. Pertama, telah menjadi satu kemestian untuk melakukan proses perubahan paradigma pembangunan pertanian di Indonesia. Kedua, perlu adanya gerakan modernisasi dan reorientasi pembangunan pertanian, ke pembangunan pertanian berorientasi produksi dan market internasional. Ketiga, perlu adanya gerakan pendidikan dan penyuluhan pertanian kepada rakyat Indonesia, khususnya kaum generasi muda Indonesia melalui jalur pendidikan formal.

II. PERTANIAN DAN PEMBANGUNAN

Dalam padangan Dawam Rahardjo (Kompas, 22/8/2000) pembangunan pertanian di masa Orde Baru telah membawa beberapa hasil⁶.

Pertama, adalah peningkatan produksi, khususnya di sektor pangan yang berpuncak pada pencapaian swasembada pangan pada tahun 1984. Ketersediaan bahan pangan, khususnya beras, dengan harga yang relatif murah, memberikan kontribusi terhadap proses industrialisasi dan urbanisasi yang membutuhkan pangan murah.

Kedua, sektor pertanian telah meningkatkan pendapatan devisa di satu pihak dan penghematan devisa di lain pihak sehingga memperbaiki posisi neraca pembayaran Indonesia.

⁶ M. Dawam Rahardjo. *Pembangunan Pertanian di Persimpangan Jalan*. Kompas, 22 Agustus 2000.

Ketiga, pada tingkat tertentu sektor pertanian telah mampu menyediakan bahan-bahan baku industri sehingga melahirkan agroindustri.

Keempat, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan lapisan bawah penduduk ikut membantu mengangkat penduduk dan kehidupan di bawah garis kemiskinan.

Kelima, pendapatan yang meningkat dari lapisan menengah ke atas telah menciptakan potensi modal yang berasal dari tabungan pedesaan.

Hasil-hasil pembangunan dalam bidang pertanian di era Orde Baru ini, secara empirik telah menghasilkan perbaikan bagi proses pembangunan nasional saat itu. Namun, dalam skala makro dan skala mikro, layaknya dimensi pembangunan di luar pertanian, pembangunan pertanian itupun mengandung sejumlah paradoks yang tidak memiliki nilai keberpihakan kepada rakyat, khususnya para petani. Lebih lanjut, Rahardjo, mengatakan :

Pertama, peningkatan produksi pertanian telah menimbulkan kecenderungan menurunnya harga produk-produk pertanian yang berakibat negatif pada pendapatan petani.

Kedua, peningkatan produktivitas dan produksi tidak selalu dibarengi atau diikuti dengan meningkatnya pendapatan petani, bahkan pendapatan petani cenderung menurun.

Ketiga, perkembangan ekonomi yang lebih maju, khususnya karena dampak industrialisasi, menyebabkan

menurunnya sumbangan (*share*) sektor pertanian dalam pembentukan PDB dan menyusutnya peranan relatif angkatan kerja sektor pertanian dalam lapangan kerja keseluruhan.

Di masa Orde Baru, layaknya pembanguna ekonomi dalam bidang-bidang yang lainnya, ternyata sektor pertanian hanya bisa berkembang dalam kebijaksanaan yang protektif, memakan subsidi dan mendapat intervensi yang sangat mendalam, sehingga sektor pertanian dianggap *most-heavily regulated*. Dalam kecenderungan liberalisasi ekonomi dewasa ini, sektor pertanian menghadapi sejumlah masalah menghadapi tuntutan pembebasan dari subsidi, proteksi dan intervensi pemerintah. Mungkin karena kurang berhasilnya pembangunan pertanian, dewasa ini dalam persaingan global, ternyata sektor pertanian Indonesia nampak kurang kompetitif sebagaimana dicerminkan dari masih lebih tingginya harga beras dan gula dari produk yang sama dari negara-negara lain.

Berdasarkan penelitian World Economic Forum (WEF), sebagaimana dinyatakan Yudohusodo (1999) daya saing Indonesia pada tahun 1996 menduduki peringkat ke-41 dari 46 negara terkemuka di antara sekitar 200 negara di dunia⁷. Jepang berada pada urutan ke-4, setelah AS, Singapura, dan Hongkong. Negara-negara ASEAN lainnya (kecuali anggota-anggota yang baru) berada di atas Indonesia; Malaysia 23, Thailand 30, dan Filipina 31. Untuk masa krisis sekarang ini,

⁷ Siswono Yudohusodo. Modernisasi Pertanian Merupakan Harga Mati. Kompas, 22 Maret 1999.

daya saing dan produktivitas kita menurun, karena di mana-mana orang berdiskusi politik, tidak bekerja produktif.

Rendahnya daya saing kita juga dapat dilihat dari produk hasil pertanian. Walaupun Indonesia adalah negara agraris, yang sekitar separuh dari angkatan kerjanya bekerja di sektor pertanian, namun kita masih mengimpor banyak sekali hasil pertanian. Setiap tahun, Indonesia (Yudohusodo, 1999) mengimpor beras sekitar dua juta ton, jagung satu juta ton, kedelai 0,8 juta ton, gaplek 0,9 juta ton, gandum 4,5 juta ton, gula 400.000 ton, dan ternak sapi setara dengan 375.000 ekor, terdiri dari 290.000 ekor sapi hidup dan 22.000 ton daging ekuivalen dengan 85.000 ekor. Ditjen Peternakan melaporkan, kalau kita tidak meningkatkan pertambahan ternak sendiri (*breeding*), bisa-bisa impornya mencapai 700.000 ekor sapi di tahun 2000. Dalam bidang buah-buahan, sebagaimana dikemukakan Kustarinah Suparno (1993:36-48) Siswoputranto (1993:49), Indonesia memang belum memiliki kualitas yang baik. Nilai daya saing dengan negara asing masih sangat lemah⁸.

Impor beberapa komoditas pangan yang masih kita lakukan itu disebabkan oleh belum efisien dan belum produktifnya usaha pertanian. Penyebab yang mendasar adalah karena rata-rata luas lahan usaha tani per keluarga tani semakin sempit, teknologi budidaya pertaniannya sudah ketinggalan zaman dan tidak efisien, serta sulit menerapkan teknologi maju, tingkat ketergantungan yang tinggi pada alam. Juga iklim usaha yang tidak kondusif, sehingga produktivitasnya rendah dan

⁸ Kustarinah Suparno. 1993. "Pasar Produk Agroindustri Pasar Potensial" dalam *Agroindustri Buah-Buahan Tropis*. Jakarta : Cides. 1993. Siswoputranto. 1993. Materi Pembahas terhadap makalah Kustarinah Suparno, dalam buku yang sama.

karenanya petaninya tidak sejahtera. Itulah akar permasalahan kemiskinan di sektor pertanian kita.

Sungguh pun begitu, ketika perekonomian Indonesia dilanda krisis, ternyata sektor pertanian justru yang relatif mampu bertahan. Ketika sektor-sektor lain, mengalami pertumbuhan negatif, sektor pertanian masih mampu bertahan pada pertumbuhan positif, walaupun pada tingkat yang rendah, yakni 0,4 persen. Lebih dari itu sektor pertanian, khususnya yang berorientasi pada pasar ekspor, justru mengalami perkembangan (*booming*), karena insentif nilai tukar yang meningkatkan penerimaan rupiah dalam nilai dollar hasil ekspor yang sama atau lebih besar.

Selama 10 tahun (1985-1994), berdasarkan laporan Bank Dunia (1995), secara relatif jumlah tenaga kerja di sektor pertanian hanya berkurang sebesar 1 persen dari 56 persen menjadi 55 persen, dan secara absolut tetap bertambah, dari 38,74 juta orang menjadi 48,76 juta orang.

Sementara itu, sumbangan sektor pertanian terhadap PDB selama kurun waktu tersebut menurun jauh lebih besar (7,8 persen), yaitu dari 25,2 persen pada tahun 1985 menjadi 17,4 persen pada tahun 1994. Angka-angka itu menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja pertanian kita secara relatif menurun. Dari tahun 1961 sampai 1995, PDB sektor pertanian menurun 34,6 persen, sektor industri meningkat 17,4 persen, sektor jasa meningkat 22,4 persen.

Kondisi yang demikian itu antara lain disebabkan oleh semakin sempitnya rata-rata luas penguasaan tanah pertanian per rumah tangga petani di Indonesia, yang menurut Sensus Pertanian 1983 dan 1993, menurun dari 0,93 ha menjadi 0,83 ha. Di luar Jawa menurun dari 1,38 ha menjadi 1,19 ha, dan di

Jawa menurun dari 0,58 ha menjadi 0,47 ha, bahkan semakin banyak petani yang hanya menguasai lahan kurang dari 0,1 ha karena jumlah petani di Jawa secara absolut bertambah, sementara areal pertanian di Jawa berkurang.

Makin besarnya jumlah absolut tenaga kerja pertanian dan semakin sempitnya rata-rata luas penguasaan tanah pertanian ini melahirkan jumlah petani gurem dan buruh tani yang makin besar yang membuktikan tidak sejahteranya petani-petani kita, yaitu dari 9,53 juta orang pada tahun 1983 menjadi 10,94 juta orang pada tahun 1993. Jumlah tersebut merupakan 51,7 persen dari 21,18 juta rumah tangga tani di negara kita (Sensus Pertanian 1993). Jumlah yang cukup besar itu tentu saja merupakan beban ekonomi di pedesaan.

Kondisi ini diperburuk lagi oleh belum siapnya industri hasil pertanian (agroindustri) di pedesaan untuk menyerap tenaga kerja petani miskin itu. Meningkatnya jumlah petani gurem ini lebih parah terjadi di Jawa, yaitu dari 7,4 juta keluarga pada tahun 1983 menjadi 8,1 juta keluarga pada tahun 1993, meningkat 9,4 persen selama 10 tahun. Di luar Jawa, peningkatan dalam masa yang sama relatif jauh lebih tinggi (33,4 persen), walaupun secara absolut jauh lebih kecil dari 2,1 juta keluarga menjadi 2,8 juta keluarga.

Untuk meningkatkan kesejahteraan para petani gurem dan buruh tani melalui peningkatan produktivitasnya, sekaligus meningkatkan produksi hasil pertanian, pembukaan areal-areal pertanian baru yang luas di luar Jawa dan dibagikan kepada para buruh tani, petani gurem, perambah hutan, peladang berpindah, adalah pilihan yang strategis. Dalam rangka itu, sekaligus perluasan areal perkebunan karet, kelapa sawit, cokelat, jambu mete, kopi, dan lain-lain. Dalam masa resesi sekarang ini,

kegiatan ini juga dapat menyerap tenaga kerja yang masih menganggur, sekaligus hasilnya merupakan sumber devisa.

III. PENDIDIKAN : JALUR PENYULUHAN PERTANIAN ANTAR GENERASI

Berdasarkan analisa terhadap wacana di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan mendasar bahwa, bangsa bangsa Indonesia memiliki kebutuhan mendesak bagi proses sosialisasi, modernisasi, dan transformasi nilai pembangunan pertanian bagi antar generasi. Hilangnya motivasi generasi muda Indonesia untuk terjun dalam dunia pertanian, bukanlah sesuatu hal yang alamiah dan natural. Hal demikian, bisa disebabkan oleh adanya kekeliruan sistem pendidikan dan atau paradigma pembangunan pertanian yang keliru.

Hijrahnya generasi muda petani ke sektor non-pertanian, merupakan bukti nyata dan factual tentang adanya ketidakmenarikannya sector pertanian sebagai sumber kehidupan atau sumber pengharapan generasi muda saat ini. Oleh karena itu, menjawab pertanian ini dapat dikemukakan sejumlah pemikiran berikut ini.

Pertama, dalam dunia pendidikan formal selama ini, sector pertanian belum dijadikan salah satu muatan local dalam kurikulum pendidikan, baik di tingkat SD, SLTP maupun SMU. Selain pada sekolah-sekolah kejuruan pertanian (SPMA), materi pertanian ini, hanyalah sebuah materi pembelajaran suplemen (pelengkap).

Kedua, imajinasi sosial peserta didik tentang mata pencaharian pertanian sebagai sektor ekonomi primitif. Ilmu

Antropologi dan Sosiologi (di SMU), dalam sejarah pembangunan Indonesia, kerap memosisikan pertanian sebagai tahap pembangunan peradaban manusia pasca primitif dan pra-industri. Jika seorang guru, salah atau tidak memberikan posisi kejelasan makna dan substansi pembelajaran tentang tahap-tahap evolusi perkembangan peradaban manusia tersebut, maka dapat memberikan pemaknaan bahwa “jika ingin modern, maka harus tinggalkan pertanian”. Bila simpulan pemikiran seperti ini, tidak diklarifikasi dan tidak dijernihkan (*clearing*), maka masa depan pertanian akan tetapi terpuruk, dan generasi muda tidak akan tertarik untuk terjun ke dunia pertanian.

Ketiga, menurut Hasan Sulama, mahasiswa pada jurusan pertanian di tingkat perguruan tinggi pun, sangat minim sekali yang paham dan memiliki motivasi yang tinggi untuk terjun ke dunia nyata pertanian⁹. Mayoritas di antara mahasiswa tersebut, adalah berharap untuk menjadi penyuluh, pendidik, atau bidang administrasi dari dinas atau departemen pertanian, bukan pada praktek pertanian di lapangan itu sendiri. Sehingga ilmu pertanian yang dimilikinya, lebih *applicable* sebagai ilmu administrasi pertanian, bukan ilmu pertanian sejati.

Keempat, merujuk pada pemikiran-pemikiran sebelumnya, kelemahan proses internalisasi dan transformasi pembangunan pertanian di Indonesia ini, bisa disebabkan oleh adanya kekeliruan paradigma pembangunan pertanian. Oleh karena itu, bila Indonesia mau melakukan proses pembangunan pertanian, maka perlu adanya pengembangan dan pergeseran paradigma pembangunan pertanian ke arah

⁹ Kasus ini, dielaborasi oleh I. Hasansulama dalam Kuliah Sosiologi Pertanian, program Pascasarjana UNPAD, BKU Sosiologi-Antropologi, tahun Akademik 2002-2003.

agroindustri, sehingga selain memberikan tantangan intelektual bagi generasi muda petani, juga akan meningkatkan kualitas kesejahteraan petani Indonesia.

Kelima, lemahnya metodologi atau efektivitas penyuluhan pertanian, baik itu yang dilakukan lembaga pendidikan formal kepada masyarakat petani dan siswa, maupun yang dilaksanakan oleh praktisi PPL Pertanian kepada masyarakat luas, tentang urgensi dan peluang pasar dari dunia pertanian. Implikasi dari kelemahan ini, adalah adanya kebuntuan dan rendahnya produktivitas dan kualitas hasil pertanian¹⁰.

IV. MODERNISASI PERTANIAN

Tidak ada pilihan lain bagi Indonesia, selain berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan pertanian yang modern dengan mengerahkan sumber daya yang lebih besar untuk membangun pertanian yang modern, yang berorientasi pada agrobisnis/agroindustri sejalan dengan industrialisasi. Modernisasi pertanian merupakan sebuah kemestian bagi

¹⁰ Untuk pengembangan metodologi atau teknik penyuluhan pertanian, dapat dikaji A.W. van den Ban dan HS. Hawkins. *Penyuluhan Pertanian*. Yogyakarta : Kanisius. 2001. Penerjemah Agnes Dwina Herdiasti. Soekartwai, dkk. *Ilmu Usaha Tani dan Penelitian Untuk Pengembangan Petani Kecil*. Jakarta : UI Press. 1986. Macmur Mulyono, dkk. 2001. *Penyuluhan Pertanian*. Jakarta : Pengembangan Sinar Tani.

proses keberlanjutan pembangunan ketahanan pangan nasional¹¹.

Pada dasarnya, sebagaimana dikemukakan Rahardjo, (Kompas, 22/8/2000)¹², masalah pertanian memang memiliki problem sendiri secara internal. Pertama, masalah penyempitan lahan pertanian. Kedua, masalah permodalan. Ketiga, teknologi yang masih sederhana. Keempat, masalah pemasaran. Selain itu, diliputi pula oleh daya tahan hasil pertanian yang sangat lemah (cepat busuk), sehingga kesulitan pemasaran, dan harga pertanian dapat dengan segera jatuh nilainya. Oleh karena itu, modernisasi, dan teknologisasi pertanian menjadi satu kebutuhan mendasar.

Strategi ini akan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, membuka peluang yang lebih baik untuk perubahan struktur ekonomi, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan serta pemerataannya, dan kelestarian lingkungan hidup; yang merupakan ciri-ciri dari pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Menurut Yudohusodo (1999) modernisasi pertanian memerlukan beberapa prasyarat yang mendasar, yaitu¹³:

1. Pemberian kepada setiap keluarga petani luasan lahan yang memenuhi skala ekonomi (mikro) untuk menjadi sejahtera.

¹¹ Urgensinya pembangunan pertanian modern, dapat dikaji buku Dudul Abdul Majid. 2001. *Membangun Pertanian Modern*. Jakarta : Pengembangan Sinar Tani.

¹² Op. cit. Rahardjo. *Pembangunan*Kompas, 22 Agustus 2002.

¹³ Op. cit. Yudohusodo. *Modernisasi*..... 22 Maret 1999.

2. Mekanisasi dalam rangka optimalisasi tenaga kerja;
3. Pembangunan pertanian dilakukan secara agrobisnis untuk menjadikan para petani berpikir dan bekerja secara ekonomis, agar dapat meningkatkan kesejahteraannya;
4. Meningkatkan keseimbangan antara kesempatan kerja pertanian dan kesempatan kerja di luar pertanian di desa-desa melalui pembangunan agroindustri di desa, agar ketahanan ekonomi rakyat meningkat;
5. Membangun desa-desa menjadi pusat-pusat kegiatan ekonomi.

Strategi ini sangat tepat untuk diterapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang kita miliki dan kuasai, yang berupa lahan yang sangat luas yang belum dibuka, maupun yang telah dibuka dengan berbagai tanaman dan komoditasnya yang telah ada; juga potensi pengembangan peternakan dan lautan yang luas dengan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya. Untuk mendukung hal itu alokasi dana dari pemerintah untuk membuka areal pertanian baru perlu diperbesar serta meningkatkan akses petani kepada pasar dan modal; politik dan kelembagaan harus mendukung.

Keberhasilan program pertanian sangat ditentukan oleh tingkat keberhasilan kita dalam membangun wilayah-wilayah pertanian baru yang modern, yang dibangun oleh petani-petani modern dengan usaha tani yang juga modern; pertanian yang progresif dan dinamis, fleksibel, menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar, dan produktif.

Membangun petani yang berorientasi pasar, berorientasi pada keuntungan, mampu merencanakan dan menentukan

pilihan terbaik bagi usaha yang dikembangkannya dengan mengadakan penyempurnaan terus-menerus atas teknologinya, agar usahanya menjadi efisien.

V. PENUTUP

Sebagai penutup, dapat kita perhatikan rambu-rambu normative yang dicantumkan dalam GBHN 1999-2004, mengenai kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia. Dalam GBHN ini, dinyatakan bahwa ¹⁴:

Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau dengan memperhatikan peningkatan pendapatan petani dan nelayan, serta peningkatan produksi yang diatur undang-undang.

Arah kebijakan yang dikemukakan dalam GBHN ini, menarik untuk dikaji dari struktur pewartannya. Di dalam wacana singkat tersebut, memiliki implikasi yang sangat luas dan mendalam. Dengan kata lain, bila struktur ancaman pembangunan ini, dirinci secara jernih, maka pokok pikirannya dapat dirumut dapat program-program yang spesifik.

Pertama, pembangunan pertanian di Indonesia, berorientasi pada target jangka panjang untuk membangun ketahanan pangan nasional. Pokok pikiran ini, merupakan sebuah respon empirik,

¹⁴ GBHN 1999 – 2004. . Bab IV . Arah Kebijakan. Bagian B, poin 15.

realistic dan rasional terhadap realitas potensi Indonesia yang bersifat agraris dan kaya akan keanekaragaman potensi sumber daya alam hayati dan nabati.

Kedua, pembangunan pertanian ini berorientasi pada keragaman sumber daya lokal. Oleh karena itu, proses desentralisasi ini, tidak selamanya bermakna politik, melainkan bermakna operatif bagi dunia pembangunan. Implikasi dari pemikiran ini, yaitu pentingnya setiap daerah memiliki keunggulan komparatif sumber daya pertanian bagi penunjang terhadap ketahanan pangan nasional.

Ketiga, penghargaan terhadap lembaga atau institusi adat dalam memberdayakan sector pertanian. System pengairan tradisional, seperti Subak di Bali, memiliki posisi strategis dalam memberdayakan manajemen pembangunan pertanian di pedesaan¹⁵.

Keempat, perhatian terhadap nutrisi atau kesejahteraan petani. Merupakan satu kebutuhan yang sangat penting bagi proses keberlanjutan pembangunan ekonomi Indonesia saat ini dan masa mendatang.

Kelima, hal yang tak kalah pentingnya, sebagai implikasi dari pokok pikiran satu sampai empat di atas, adalah modernisasi pertanian¹⁶. Tanpa adanya upaya modernisasi pertanian, maka

¹⁵ Sistem kelembagaan yang lainnya, baik itu kemitraan dan koperasi, dapat dilihat pembahasannya lanjutannya pada M. Amin Azis. "Strategi Pengembangan Agroindustri Buah-Buahan Tropis" dalam *Agroindustri Buah-Buahan Tropis*. Jakarta : Cides. 1993.

¹⁶ Untuk contoh modernisasi dan industrialisasi dalam bidang pertanian ini, dapat dilihat Farid A. Bahar, Adhi Santika dan M. Winarno. "Pemilihan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Usaha Agroindustri Buah-

kebutuhan dan cita-harap tersebut di atas, akan sulit untuk diwujudkan.

Dengan memperhatikan GBHN 1999-2004 ini, maka tidak salah bila optimisme bangsa Indonesia terus dipupuk untuk menjadi sebuah negara besar, sebagai negara swasembada yang memiliki ketahanan pangan yang kokoh, tangguh dan kompetitif akan tercapai, jika petani dan atau sektor pertaniannya dapat dikonstruksi secara modern. *Wallahu'alam bi showwab.*

Buahan Tropis Potensial” dalam *Agroindustri Buah-Buahan Tropis*.
Jakarta : Cides. 1993.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, dan Jurnal

- Azis, M. Amin. "Strategi Pengembangan Agroindustri Buah-Buahan Tropis" dalam *Agroindustri Buah-Buahan Tropis*. Jakarta : Cides. 1993.
- Bahar, Farid A; Adhi Santika dan M. Winarno. "Pemilihan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Usaha Agroindustri Buah-Buahan Tropis Potensial" dalam *Agroindustri Buah-Buahan Tropis*. Jakarta : Cides. 1993.
- Ban, A.W. van den dan HS. Hawkins. *Penyuluhan Pertanian*. Yogyakarta : Kanisius. 2001. Penerjemah Agnes Dwina Herdiasti.
- Majid, Dudul Abdul. 2001. *Membangun Pertanian Modern*. Jakarta : Pengembangan Sinar Tani.
- Mulyono, Macmur dkk. 2001. *Penyuluhan Pertanian*. Jakarta : Pengembangan Sinar Tani.
- Rahardjo, M. Dawam. *Pembangunan Pertanian di Persimpangan Jalan*. Kompas, 22 Agustus 2000.
- Siswoputranto. 1993. Materi Pembahas makalah Kustarinah Suparno, "Pasar Produk Agroindustri Pasar Potensial" dalam *Agroindustri Buah-Buahan Tropis*. Jakarta : Cides.
- Soekartawi, dkk. 1986. *Ilmu Usaha Tani dan Penelitian Untuk Pengembangan Petani Kecil*. Jakarta : UI Press.

Suparno, Kustarinah. 1993. "Pasar Produk Agroindustri Pasar Potensial" dalam *Agroindustri Buah-Buahan Tropis*. Jakarta : Cides.

Wiranatakusmuh, M. Aman. *Saatnya Merombak Paradigma Pembangunan Pertanian*. Kompas, 13 Juli 2001.

Yudohusodo, Siswono. *Modernisasi Pertanian Merupakan Harga Mati*. Kompas, 22 Maret 1999.

Dokumen, Media Massa.

Kompas, 22 Maret 1999.

Kompas, 23 Maret 2003.

Kompas, 19 Agustus 2002.

GBHN 1999 - 2004. . Bab IV . Arah Kebijakan. Bagian B, poin 15.

BIODATA



Momon Sudarma, Majalengka, 23 November 1971, adalah seorang *tenaga pendidik yang penulis*. Dalam perjalanan karirnya, dia termasuk pendidik yang produktif menuangkan pengalaman dan pengetahuannya dalam bentuk tulisan. Sehingga tidak mengherankan, bila dalam sejumlah tahapan perjalanan hidupnya, melahirkan karya yang sudah dipublikasikan.

Sebagai alumni dari Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia, diantara karya tulisnya seperti “*Perihal Geografi Kesehatan*” dalam Jurnal Alumni UPI (2008), “*Geografi dan Pendidikan Multikultural*”, (Jurnal Literat - Uninus, 2008), “*Sekolah Sehat menuju pendidikan generasi unggul*” (Jurnal Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Malang, 2007), “*Kebahagiaan Geografik*” (Jurnal Geo, UPI, 2011), “*Indonesia sebagai peristiwa, fakta dan nilai*” (Makalah pada Pertemuan Ilmiah Tahunan IGI, 2013, UNLAM). “*Model-Model Pembelajaran Geografi*” (Jogjakarta : Ombak, 2015)

Kemudian melanjutkan pendidikan ke Program Sosiologi Antropologi Universitas Padjadjaran, lulus tahun 2007. Dari pengalaman dan kompetensinya ini, melahirkan karya “*Sosiologi untuk Kesehatan*” (Medika Salemba, 2008), “*Antropologi Komunikasi*” (Mitra Wacana Media, 2014), dan “*Sosiologi Untuk Komunikasi*” (Mitra Wacana Media, 2014).

Karir pekerjaan yang kini ditekuni, yaitu sebagai tenaga pengajar Geografi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bandung. Di luar itu, aktif sebagai pengajar Sosiologi di STIKES Aisyiyah Bandung, dan STIKOM Bandung. Sehubungan dengan profesinya sebagai tenaga pendidik, melahirkan karya “*Profesi Guru*” (Rajagrafindo, 2013), dan “*Mengembangkan Keterampilan Berfikir Kreatif*” (Rajagrafindo, 2013). *Kemahirwacanaan* (bersama M. Rakhmat, Pustaka Latifah, 2009), *Sekolah Kita pun Berhak Maju* (bersama Jajang W. Mahri, Bandung : Rizqi, 2011).

Putra asli dari Kabupaten Majalengka ini, pernah menjadi tenaga honorer di lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat sebagai *speechwriter* (penulis sambutan). Pengalamannya kemudian dituangkan karya berjudul *Menjadi Speechwriter Profesional* (Nuansa, 2006). Kini tinggal di Bandung, dengan istri tercinta, Winda, dan dua orang putranya, yakni Iqbal Fadhil Tresnadarma, dan Muhammad Aidil Fathir Sudarma.

Curhatan mingguannya bisa ditemukan di blog, yaitu (a) <http://dede.wordpress.com>, dan (b) <http://momonsudarma.blogspot.com>. Untuk alamat berkomunikasi, bisa dihubungi dari momonsudarma@yahoo.com